

Bencanatainment

OLEH: BONAVENTURA SATYA BHARATA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SILET Minta Maaf. Demikian tulisan judul salah satu portal jurnalisme online pada Senin (8/11/2010) lalu. Pada hari-hari berikutnya, salah satu tayangan *infotainment* di televisi swasta tersebut menerima kritik pedas dari masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat Yogyakarta. Pada tayangan hari Minggu (7/11), Silet menayangkan bencana letusan Gunung Merapi yang sampai hari ini pun masih berstatus awas. Dalam tayangan tersebut dinyatakan bahwa luncuran awan panas Merapi mampu menjangkau 65 km dan ramalan akan adanya letusan besar yang membuat Yogyakarta sebagai kota malapetaka pada keesokan harinya (Senin, 8/11).

Tentu saja semua pernyataan ini langsung mendapatkan kritik tajam dari masyarakat, khususnya warga Yogyakarta yang tinggal paling dekat dengan Gunung Merapi. Kritik tersebut terutama karena pengelola program Silet dituding tidak memiliki fakta dan data yang kuat untuk membangun sebuah tayangan yang layak dipercaya. Apalagi acara tersebut ditayangkan dua hari setelah Merapi meletus kuat Jumat dini hari (5/11) sehingga masih memunculkan trauma bagi masyarakat pengungsi di Yogyakarta dan sekitarnya.

Belum lepas dari ingatan kita pada beberapa bulan yang lalu, perdebatan masalah faktualitas antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan para praktisi penyiaran Indonesia, khususnya rumah produksi - rumah produksi yang membuat tayangan *infotainment*.

Kala itu KPI memiliki keinginan menempatkan acara *infotainment* sebagai acara yang non faktual. Tentu saja keinginan ini ditolak oleh segenap praktisi penyiaran yang terlibat dalam acara *infotainment* tersebut. Dalam pandangan para praktisi penyiaran, keinginan KPI tersebut terlalu mengada-ada, mengingat tayangan *infotainment* juga berbasis pada fakta. Bila KPI menempatkan tayangan ini sebagai tayangan non faktual, otomatis para pekerjaannya tidak bisa disebut sebagai jurnalis. Padahal beberapa pekerja *infotainment* sudah masuk ke beberapa organisasi wartawan yang ada di Indonesia, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ini yang juga menjadi keberatan para pekerja *infotainment* terhadap keinginan KPI tersebut.

Westerstahl dalam McQuail (1996) menyatakan bahwa faktualitas menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan selain imparisialitas dalam obyektivitas. Sebuah berita dikatakan obyektif, idealnya mencakup dua komponen tersebut, faktualitas

dan imparisialitas. Faktualitas dengan sederhana dapat dimaknai bahwa berita yang baik hendaknya berbasis pada fakta yang tepat dan akurat. Faktualitas ini sendiri masih terdiri atas beberapa elemen, yakni kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*). McQuail sendiri bahkan menambahkan elemen keinformatifan (*informativeness*).

Elemen kebenaran meliputi kelengkapan informasi, akurasi, dan tidak menyalahharakan laporan. Sedangkan elemen relevansi merujuk pada seleksi informasi yang signifikan bagi khalayak. Artinya sejauh mana informasi dalam berita tersebut bermanfaat atau relevan bagi kehidupan sosial khalayaknya. Bila ingin menambahkan sedikit dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, para penulis *The Elements of Journalism* (2001), dinyatakan bahwa berita yang baik haruslah mampu memberdayakan khalayaknya. Artinya, dengan informasi yang diberitakan tersebut, khalayak dapat berperan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Di sinilah tujuan utama dan mulia dari kegiatan jurnalisme.

Dengan demikian masalah faktualitas dalam berita tidak hanya diletakkan secara sempit dengan hanya mengacu apakah sebuah berita sudah berbasis pada fakta yang benar dan akurat atau belum (*truth*). Akan tetapi juga apakah fakta yang disampaikan tersebut membawa manfaat bagi khalayaknya (*relevance*). Inilah yang sejauh penulis amati sering diabaikan oleh pekerja *infotainment*. Seperti misalnya pemberitaan perceraian artis Anang dan Krisdayanti maupun perseteruan antara Dewi Persik dengan Julia Perez. Betul bahwa ketika menjadi tayangan *infotainment*, informasi ini berbasis pada fakta yang ada. Peristiwa perceraian antara Anang dan Krisdayanti memang terjadi. Begitu pula dengan perseteruan antara Dewi Persik dengan Julia Perez, ini pun juga merupakan peristiwa. Namun pertanyaan selanjutnya yang berkait dengan permasalahan faktualitas adalah, apakah relevansi dari peristiwa tersebut untuk khalayak? Apa pentingnya khalayak sebagai publik untuk tahu dengan detail semua peristiwa tersebut?

Di sinilah titik kritis permasalahan faktualitas pada tayangan *infotainment*.

Jika kembali ke tayangan Silet di awal, bagaimana kaitan antara permasalahan faktualitas tayangan Silet pada episode bencana letusan Gunung Merapi? Jelas bahwa tayangan itu tidak dapat disebut sebagai tayangan yang faktual. Tidak hanya masalah fakta yang tidak tepat dan tidak akurat, namun juga dari sisi relevansinya pun bermasalah.

Fakta yang tidak tepat dan tidak akurat misalnya adalah bahwa awan panas mampu menyembur hingga 65 km dari puncak Merapi. Soerono sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pernah menyampaikan kepada masyarakat, bahwa sepanjang sejarah letusan Gunung Merapi, awan panas paling jauh hanya menyembur sampai dengan 15 km saja. Pernyataan ini tentu menegaskan kepada masyarakat bahwa fakta atau data yang digunakan Silet tidak tepat dan tidak akurat. Selain itu, pernyataan bahwa akan terjadi puncak letusan Merapi pada Senin (8/11) masih perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah fakta tersebut merupakan fakta yang tepat dan akurat.

Mari coba kita simak pernyataan Silet pada tayangan tersebut, "Puncak letusan Merapi kabarnya akan terjadi hari ini hingga esok hari pada bulan baru yang jatuh pada tanggal 8 November. Ahli LAPAN selalu mencari hampir semua letusan dan 'guncangan gempa muncul pada bulan baru. Lantas apa yang akan terjadi dengan Yogyakarta? Mungkinkah Yogyakarta, kota budaya yang elok akan tergolek lemah tak berdaya? Benarkah Jogja yang dalam banyak lagi digambarkan begitu indah akan berubah menjadi penuh malapetaka?" Jika diperhatikan dengan benar pernyataan tersebut, terjadinya puncak letusan Gunung Merapi baru pada tahapan dugaan saja. Ini terlihat dari penggunaan kata "kabarnya".

Kembali pada pernyataan Soerono sebagai Kepala PVMBG, bahwa selama ini para ahli vulkanologi hanya mampu mempelajari secara ilmiah perilaku gunung berapi (termasuk Gunung Merapi), namun untuk me-

ngetahui kapan persisnya letusan terjadi hanyalah gunung berapi itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Sekali lagi, artinya fakta yang diberikan oleh Silet jelas bukan merupakan fakta yang tepat dan akurat. Belum lagi kalau kita memperhatikan konstruksi pernyataan tersebut. Terlihat jelas pernyataan tersebut bersifat sensasional bila tidak ingin dikatakan sebagai bombastis. Bila benar seperti ini, barulah kita dapat mempertanyakan elemen relevansi sebagai salah satu komponen faktualitas pada tayangan Silet episode Gunung Merapi ini. Pertanyaannya, apa relevansi bentuk pernyataan seperti ini untuk masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya?

Seperti dinyatakan oleh Laswell dalam Dominick (2009), memang benar bahwa salah satu fungsi komunikasi massa adalah melakukan pengawasan atau peringatan (*surveillance*). Artinya bahwa komunikasi massa berkewajiban memberikan peringatan akan adanya potensi-potensi yang membahayakan. Misalnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Fungsi ini tentu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan persiapan dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada. Akan tetapi cara menyampaikan fungsi pengawasan atau peringatan ini tentu perlu dipertimbangkan oleh jurnalis atau pekerja media. Dengan demikian masyarakat yang menerima informasi justru bukan menjadi resah dan panik karena pernyataan dan bentuk pernyataan yang disampaikan oleh media massa tersebut.

Akhirnya bila pekerja *infotainment* tetap bersikeras bahwa produk yang dibuatnya adalah juga bentuk dari jurnalistik yang faktual sifatnya, pekerja *infotainment* perlu dengan seksama mempelajari pemahaman faktualitas ini dengan lebih luas. Seperti dikemukakan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel di atas, sejatinya eksistensi jurnalisme dimaksudkan agar masyarakat mampu berperan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan informasi yang diterima, masyarakat mampu menentukan sikap sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat. Bukan sebaliknya, ketika menerima informasi masyarakat justru menjadi panik dan resah. Bila hal ini yang terjadi, mungkin tayangan ini lebih tepat disebut sebagai *bencanatainment* daripada *infotainment*.

Bonaventura Satya Bharata, M.Si.
Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.